ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.9, Agustus 2023

Membongkar Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Leonardus Subang Koten
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta
E-mail: leonarduskoten@gmail.com

Article History:
Received: 21 Juli 2023
Revised: 02 Agustus 2023
Accepted: 04 Agustus 2023

Keywords: *Policy, Fishery Resources 3 Villages*

Abstract: *Indonesia is famous for its marine and fisheries resources, therefore fisheries resource management is something that must be done through a policy program that can develop the potential of fisheries resources. This study aims to determine the management of fisheries resources by the Fisheries Service of East Flores Regency through policy programs including the fuel subsidy program for fishermen, the protection and empowerment program for small fishermen, the program to eat fish, and the capture fisheries program. The method in the research used a descriptive qualitative approach with data collection methods of observation, interviews, documentation and Focus Group Discussions. The research object in this study is to dismantle the Fisheries Service policy in managing fisheries resources. Primary data was collected through detailed interviews with 19 informants, namely policy makers and program managers at the Fisheries Service, village heads and several fishermen. Data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the management of fisheries resources in East Flores Regency is still not running optimally, this is because it is related to several fisheries agency programs that have not been evenly distributed in the East Flores Regency area, especially in Amagrapati Village, Ilepadung Village, Adabang Village. Because it still has shortcomings such as access to diesel fuel subsidies for fishermen, lack of counseling and empowerment of small fishermen, the Gemarin program has not been implemented evenly in the East Flores Regency area, and capture fisheries programs that have not been felt evenly by most fishermen in East Flores Regency who mostly still use simple equipment to go to sea.*

PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana Indonesia berada diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia dan dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga Indonesia disebut juga nusa diantara laut atau sering diistilahkan dengan nusantara. Sebagai negara kepulauan menurut Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut *(United Nations convention on the law of the sea)* 1982 Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang ditutup oleh atau terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan (https://lawforjustice.wordpress.com/tag/wilayah-perairanlaut-Indonesia/.Diakses pada tanggal 03 Juli 2022).

Laut merupakan sumber kehidupan karena memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah. Sumber kekayaan alam tersebut, menurut amanat Pasal 33 UUD-1945 harus dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat pesisir memerlukan terobosan dan inovasi baru yang dapat meningkatkan akses terhadap modal, manajemen, teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan budaya lokal dalam masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Terobosan yang dimaksud adalah pemberdayaan bagi masyarakat pesisir yang ada di seluruh Negara Republik Indonesia.

Pengelolaan sumberdaya alam adalah usaha manusia dalam mengubah ekosistem untuk memperoleh manfaat maksimal, dengan mengupayakan kesinambungan produksi dan menjamin kelestarian sumberdaya tersebut (Afiati, 1999). Pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab terutama perikanan tangkap haruslah benar-benar memperhatikan daya dukung sumberdaya perikanan di wilayah perairan Indonesia, bahkan Purwanto (2003), secara eksplisit mengungkapkan bahwa apabilasumberdaya ikan laut yang hidup dalam wilayah perairan Indonesia dimanfaatkan secara benar dan bertanggungjawab yaitu tidak melebihi daya dukungnya, sumberdaya tersebut akan dapat mengahasilkan produksi maksimum lestari sekitar 6,4 juta ton pertahun. Selain itu masyarakat Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (high sea). Sebaliknya bila sumberdaya ikan tersebut dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, kelestarian sumberdaya ikan akan terancam dan produksinya akan menurun. Untuk mendukung sumber daya alam yang ada pemerintah membuat suatu terobosan kebijakan yang untuk mendukung sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun pelayanan publik yang dimaksud melaui pemberdayaan, peningkatan kapasitas SDM masyarakat. Optimalisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan, penguatan modal, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan, dan modernisasi sarana dan prasarana.

Paradigma pembangunan mengalami perubahan, tuntutan paradigma pembangunan berbasis sumber daya alam dewasa ini adalah mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan.Secara sederhana pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan 3 tujuan pembangunan yang harus dapat berjalan secara simultan, yakni upaya pencapaian tujuan secara ekonomi, tujuan secara sosial dan kelestarian sumber daya yang ada.(Charles 2001) mengingatkan pentingnya upaya yang harus diperhatikan dalam pembangunan dan pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan. Yakni: (a) keberlanjutan manfaat sosial ekonomi; (b) keberlanjutan komunitas; (c) keberlanjutan kelembagaan; dan (d) keberlanjutan ekologi.

Berkaitan dengan hal ini Kabupaten Flores Timur memiliki luas wilayah 5.983,38 km2 terdiri dari luas daratan 1.812,85 km2 dan luas perairan sekitar 4.170,53 km2 maka dengan demikian perairan Kabupaten Flores Timur melebihi luas daratan, dan bisa disimpulkan bahwa

sektor perikanan memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan, berdasarkan data jumlahproduksi perikan tahunan di Kabupaten Flores Timur pada 201614.953, tahun 2017 sebanyak 15.078ton. Pada 2018 berjumlah 15.230 ton, tahun 2019 15.598 ton, tahun 2020 15.681 ton, tahun 2021 15.497 ton total produksi 77.084 ton. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa produksi perikanan di kabupaten Flores Timur cenderung meningkat setiap tahun namun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Adapun perbandingan Desa Adabang, Desa Ilepadung dan Kelurahan Amagrapati sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Flores Timur yang terkenal dengan berbagai hasil perikanannya yang merupakan daerah pesisir. Banyak nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan, namun ada juga yang belum termasuk dan dan terorganisir dalam kelompok nelayan.

Pada dasarnya para nelayan berupaya secara mandiri dan memiliki keterbatasan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya. Tetapi kelompok nelayan tersebut juga belum mampu untuk mengatasi masalah-masalah pengelolaan perikanan antara lain sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah dalam produktivitas dan pengelolaan perikanan, kurangnya dukungan dan fasilitasi dari pemerintah desa maupun kelurahan, dan juga kurangnya pendampingan dan penyuluhan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Beberapa faktor yang masih menjadi kendala dan tantangan pemerintah Kabupaten Flores Timur saat ini dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 antara lain: Peningkatan produksi perikanan belum diikuti dengan penggunaan sarana tangkap yang ramah lingkungan, belum berkembangnya budidaya perikanan laut dan air tawar, sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan potensi perikanan masih terbatas, keterbatasan tenaga penyuluh dan penyuluhan perikanan, maearknya kasus pencurian ikan (*illegal fishing*), penangkapan ikan menggunkan bahan peledak (bom) dan zat-zat kimia seperti potassium, sianida dan zat aditif lainnya masih banyak, tingginya penangkapan biota/mamalia laut yang dilindungi, masih banyak terjadi penebangan hutan mangrove, masih tingginya pencemaran laut melalui pembuangan limbah rumah tangga maupun limbah lainnya. Pengelolaan sumberdaya laut belum dilaksanakan secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya kasus illegal fishing dan destructive fishing, penggunaan sarana tangkap tidak ramah lingkungan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut.

Foucault tentang governmentality berpendapat bahwa kekuasaan selalu berimplikasi pada pengetahuan, bahwa kekuasaan itu berada pada strategi yang dijalankan pada setiap tingkatan.Jadi, kekuasaan itu bukan monopoli kalangan atau kelas tertentu. Kekuasaan bersifat produktif, bahkan akan memproduksi pengetahuan. Foucault sendiri memandang kekuasaan dengan empat cara pertama, kekuasaan tidak dipahami dalam pengertian hegemoni dan dominasi, tetapi dibentuk melalui relasi antar manusia yang sederajat serta memiliki kekuatan yang sama dan setara. Karena itu pandangan Foucault mengkritik dengan tegas praktik penyimpangan kekuasaan dimana pemerintah yang berkuasa cenderung dilayani ketimbang melayani. Kedua kekuasaan itu menyebar dimana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi. Dimana ada struktur dan relasi disitu ada kekuasaan. Kekuasaan tidak ditentukan oleh subjek yang berasal dari luar struktur relasi yang ada, tetapi dari dalam struktur relasi itu sendiri, ketiga kekuasaan hanya dapat dioperasikan dalam bidang tertentu, tidak bisa digeneralisasikan, keempat kekuasaan dan pengetahuan memiliki relasi yang sangat kuat.

Governmentality memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif. Dalam perspektif ini, tujuan hubungan kekuasaan mengambil tiga bentuk mendasar bagi otoritas modern. Kekuasaan berdaulat dipandang sebagai menjalankan otoritas atas subjek dalam suatu wilayah atau negara (pajak, hukum), kekuasaan disiplin dipandang sebagai mengatur ketertiban

orang dalam suatu wilayah (sekolah, militer, pekerjaan), dan pemerintah dipahami sebagai bentuk kekuasaan. berkaitan dengan kapasitas dan hubungan antara orang-orang sebagai sumber daya untuk dibina dan dioptimalkan. Pemerintahan yang baik dipandang melampaui pelaksanaan kekuasaan berdaulat untuk mendorong kemakmuran, kesehatan, umur panjang, produktivitas, dan kebahagiaan penduduk. Diakui bahwa kekuasaan politik dijalankan dalam beberapa cara melalui berbagai lembaga, kelompok sosial, dan teknik, yang mungkin hanya terkait secara longgar dengan birokrasi formal negara. Governmentality, kemudian, tertarik pada analisis mekanisme pemerintahan dan proses atau praktik spesifik dan beragam yang ditemukan di dalam dan di luar lembaga negara yang melintasi domain yang biasanya dianggap terpisah misalnya, negara, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah dipandang bukan sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai kumpulan dari beragam elemen, praktik, dan cara berpikir yang datang bersama-sama untuk membingkai dan menyelesaikan masalah.

Pendekatan ini mendorong nelayan untuk membentuk kelembagaan nelayan yang kuat agar dapat membangun sinergi antar nelayan, baik dalam proses belajar dan kerjasama maupun sebagai unit produksi yang merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai nelayan. Pembinaan kelompok nelayan yang dilaksanakan secara berkesinambungan diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan kelompok nelayan dalam melaksanakan fungsinya meningkatkan gairah, dan kemampuan produktivitas kerja secara optimal sehingga mampu mengembangkan usaha kelompok nelayan dan menjadi organisasi nelayan yang kuat dan mandiri.

Relasi yang dibangun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur dengan masyarakat Desa kelompok nelayan di Desa Adbang, desa Ilepaadung, dan kelurahan Amagrapati adalah melalui dukungan dari pemerintah terkait capaian program yang yang telah dilakukan lewat pembenahan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan di Kabupaten Flores Timur, subsidi BBM untuk nelayanmerupakan sebuah langkah yang telah diambil oleh dinas perikanan Kabupaten Flores Timur adalah penimbunan BBM (Perda No. 2/2004),Program Gemar Makan Ikan (Gemarin), perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, dan juga implementasi program perikanan tangkapdengan penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Langkah yang diambil oleh pemerintah desa yang bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur terkait fasilitasi yang diberikan dengan metode penyuluhan, pendampingan, serta pelatihan pengelolaan perikanan kepada anggota kelompok nelayan agar kelompok nelayan tersebut mampu mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan kelompok nelayan.

Dengan potensi perikanan dan kelautan yang demikian besar dimiliki oleh Kabupaten Flores Timur, idealnya sektor ini mampu memberikan kontribusi yang dominan dari pada sektor-sektor lainnya.Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur seharusnya perlu melakukan kebijakan strategis yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir untuk mewujudkan nelayan yang sejahtera melalui kelompok-kelompok nelayan.Potensi perikanan di kabupaten Flores Timur memiliki prospek yang cukup cerah.Dengan demikian potensi perikanan dapat dikembangkan untuk membangun kegiatan ekonomi masyarakat yang mandiri, sejahtera, strategis dan berkelanjutan.

Namun kenyataannya di lapangan masih terdapat kendala dalam pegembangan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Flores Timur, antara lain kurangnya pendampingan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, kurangnya pemasaran untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi laut yang ada, serta belum adanya pengelolaan ikan yang jelas sehingga kebanyakan ikan yang sudah ditangkap oleh nelayan biasanya di jual secara mentah ke perusahaan pembekuan ikan maupun dijual eceran sisanya biasayan diawetkan secara

tradisional dengan dikeringkan dan jika tidak bahkan dibiarkan atau dibuang begitu saja.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Finsensius Fererius Payong, 2021 tentang strategi pengembangan sektor perikanan dalam meningkatkan PAD (Pendpatan Asli Daerah) Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Flores Timur belum dilakukan secara optimal. Karena masih memiliki beberapa kekurangan dalam proses pengembangan perikanan yang ada antara lain Aspek sumber daya ikan, Aspek Produksi, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Aspek sarana dan prasarana, Aspek Pemasaran dan Aspek Ekonomi. Saran dari penelitian ini, yaitu Mengingat potensi perikanan yang menjanjikan dan sumber anggaran pembiayaan pembangunan terkhusus (PAD) Kabupaten Flores Timur perlu adanya kebijakan yang direkomendasikan mengandung asumsi rasional komprehensif, maka kiranya beberapa alternatif kebijakan hendaknya dapat menjadi suatu rangkaian kegiatan/kebijakan yang satu sama lain akan mendukung dan melengkapi (sinergi). Karena hal tersebut tentunya akan lebih memberikan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah serta masyarakat nelayan di Kabupaten Flores Timur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah saat ini.

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Agus Sulaiman Bolkiah, (2021) tentang Evaluasi program bidang pemberdayaan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di dinas perikanan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak yang menjadi tugas besar bagi Pemda.Selain itu anggaran yang terbilang masih sedikit, akses informasi, pengadaan sarana dan prasarana yang terbilang masih sangat kurang memadai, sedangkan produksi perikanan tangkap cenderung dari tahun ke tahun meningkat di dapat oleh masyarakat nelayan, sehingga pemda dirasa perlu mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki, sudah selayaknya dikembangkan agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan. Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di dinas perikanan Kabupaten Pamekasan. Kemudian juga melihat strategi program yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat evaluasi program tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di dinas perikanan Kabupaten Pamekasan masih banyak yang menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah untuk menyukseskannya, selain anggaran yang terbilang masih sedikit, akses informasi, pengadaan sarana dan prasarana yang terbilang masih sangat kurang memadai, sedangkan, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pamekasan cenderung dari tahun ke tahun meningkat didapat oleh masyarakat nelayan, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dirasa sangat perlu untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Pamekasan.

LANDASAN TEORI

Governmentality merupakan transformsi dari perkembangan pemikiran Foucault dari lingkup kajian sebelumnya tentang relasi kuasa. Dalam memahami dunia modern, Foucault mencoba mempertautkan fase perkembangan. Pemikirannya bahwa pengetahuan dan kekuasaan berimplikasi terhadap individu di dalam suatu bentuk kontrol sosial. Sebagaimana pola *Disciplineand Phunish*, Foucault mengistilahkan bentuk kekuasaan dengan pendisiplinan, dimana teknologi kekuasaan turut serta dalam proses pendisiplinan (Suyono, 2008). Governmentality

merupakan proses pembentukan rasionalisasi mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan oleh negara agar beroperasinya dapat diakui dan merupakan hasil yang legitimate (Focault dalam Mudhoffir, 2013). Governmentality bergerak pada kedisiplinan yang lebih luas, menyasar pada tubuh secara sosial yaitu masyarakat. Aktor yang ada dalam governmentality adalah pemerintah, lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintahan terkait juga pada masyarakat.Pada akhirnya tujuan dari governmentality adalah masyarakat yang patuh dan disiplin.

Menurut Foucault governmentality merupakan kekuasaan dalam bentuk disciplinary power. Jika objek disciplinary power adalah tubuh induvidu, maka subjek governmentality adalah populasi (tubuh sosial). Bentuk pengetahuan dalam model disciplinary power adalah rezim kebenaran, sedangkan pada governmentality berupa politik kekuasaan (Foucault dalam Mudhoffir, 2013).

Dalam alur pemikiran governmentality, disitu ditemukan oleh adanya jaringan-jaringan kekuasaan oleh pemerintah yang dilakukan melalui adanya sebuah standard-standard kebenaran.Standard-standard kebenaran tersebut dilakukan melalui proses-proses seperti adanya simplifikasi, efektifitas, kontrol, serta manajemen yang digunakan untuk penguasaan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya untuk mencapai sebuah tujuan.Teori Foucault tentang governmentality menyebutkan mengenai pemerintah yang memiliki fungsi dalam keputusan final dan memiliki fungsi kedaulatan, maka pemerintah dengan mudahnya dalam membuat kebijakan dan peresmian kebijakan dengan menggunkan strategi kuasanya (Foucault dalam Fuady, 2009).

Kekuasaan menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerful* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya kekuasaan sebuah negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok, demikian menurut Foucault bagaimana kekuasaan harus dipahami.

Pemahaman kekuasaan atau kuasa dalam pandangan Foucault berbeda dengan model kekuasaan Marxian yang dikenal dengan istilah pertentangan kelas.Konsep tersebut meniscayakan adanya hierarki dua kekuasaan yang saling bertentangan, yang *powerfull* vs *powerless*.Namun berbeda menurut Foucault, bahwa kekuasaan atau kuasa tidak terpusat pada satu ruang sosial dominan yang mampu menguasai ruang dominan lainnya.Tetapi kekuasaan justru menyebar dan mengalir dalam ruang praktik-praktik sosial.Kekuasaan bukan pada pemahaman yang negative dan kontra produktif, melainkan sebaliknya. Sehingga kekuasaan lebih diartikan sebagai sebuah upaya strategi kompleks yang ada di dalam praktik-praktik sosial masyarakat modern (Foucoult dalam Mudhoffir, Jurnal, 2013).

The art of government, as becomes apparent in this literature, is essentially concerned with answering the question of how to introduce economy-that is to say, the correct manner of managing individuals, goods and wealth eithin the family (which a good father is expected to do in relation to his wife, children and servants) and of making the family fortune prosper-how to introduce this meticulous attention of the father toward his family into the management of the state (Foucault dalam The Foucault Effect, 1991).

Foucault melihat realitas sosial sebagai arena diskursif (*discursive field*), yang merupakan kompetisi bagaimana makna dan pengorganisasian institusi serta proses sosial itu diberi makna melalui cara-cara yang khas. Pengetahuan harus dijelaskan berdasarkan institusi dan peristiwa yang berlangsung dalam institusi, baik yang bersifat teknis, ekonomis, sosial maupun politik, Namun institusi-institusi itu sendiri tidak dapat berfungsi tanpa adanya

kekuasaan. Faucault mengatakan analisis kekuasaan yang bersifat institusional – tidak personal. Tetapi tidak seperti kaum Marxis, Foucault tidak mempelajari kekuasaan dalam suatu proses mekanisme. Kekuasaan tidak dipandang sebagai perwujudan atau konsekuensi logis dari kepemilikan ekonomis, tetapi sekedar sebagai strategi untuk melaksanakan sesuatu.Istilah strategi yang dimaksudkan bukanlah suatu kelompok individu dalam melaksanakan sesuatu, melainkan "dampak dari suatu posisi strategis."Dia menjelaskan bahwa tipe-tipe *power* bukan berfungsi untuk memfungsikan makna tindakan atau ucapan, karena ketentuan-ketentuan untuk bertindak dapat dibentuk langsung tanpa lewat perantara makna (Wirawan, 2012).

Dalam genealogi kekuasaan, foucault membahas bagaimana orang mengatur dirinya sendiri dan orang lain melalui produksi pengetahuan. Diantaranya, ia melihat pengetahuan menghasilkan kekuasaan dengan mengangkat orang menjadi subjek dan kemudian memerintah subjek dengan pengetahuan. Ia mengkritik penyusunan pengetahuan secara bertingkat (hierarkisasi pengetahuan). Karena bentuk tingkatan tertinggi pengetahuan (ilmu pengetahuan) mempunyai kekuasaan terbesar, maka ilmu pengetahuan dikhususkan untuk dikritik paling keras. Foucault pun memperhatikan teknik, teknologi yang berasal dari pengetahuan (terutama yang beraal dari ilmu pengetahuan ilmiah), dan memperhatikan cara teknologi digunakan oleh berbagai institusi untuk memaksakan kekuasaan terhadap manusia. Meski Ia melihat kaitan antara pengetahuan dan kekuasaan, Foucault tak melihat persekongkolan anggota elit masyarakat. persekongkolan secara tak langsung menyatakan kesengajaan aktor (Foucault, 1979).

Dalam masyarakat modern, semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pengetahuan. Semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan. Keinginan untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap obyek-obyek dan terhadap manusia. Dari pengetahuan tersebut seseorang dapat menguasai terhadap manusia lainnya. Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan atau pemerintah dengan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan. Kekuasaan juga identik dengan keuntungan yang sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat.

Oleh sebab itu, Foucault istilah kuasa (*power*) disini menunjuk pada totalitas struktur-struktur tindakan untuk mengarahkan tindakan dari individu-individu yang merdeka. Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berada dalam posisi untuk memilih dan ditujukan untuk mempengaruhi pilihan mereka. Foucault lalu membedakan relasi kuasa menjadi tiga bagian, diantaranya:

1. Relasi kuasa sebagai "permainan strategis" (*strategic games between*) antara pihak-pihak yang merdeka. Kuasa (*power*) di level ini hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemerdekaan. Sehingga tidak ada dominasi yang dijalankan dalam relasi kuasa ini, murni sebagai permainan strategi. Dalam konsep ini, kuasa menentukan relasi antara mitra dalam suatu enamble tindakan-tindakan. Berdasarkan persoalan yang terjadi di lapangan bahwa bagaimana hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan yang saling berkaitan dan masyarakat sebagai subjek yang kemudian diperintah subjek dengan pengetahuan hal ini tentunya berkaitan tentang relasi kuasa antara pemerintah dalam hal ini Dinas yang sebagai pembuat kebijakan yang sudah ada belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yaitu bagaimana pemerintah sebagai pengambil kebijakan membangun mitra komunikasi dengan masyarakat

jika tidak maka hal ini dapat disebut dengan kekuasaan strukturalis karena ia menempatkan gagasan manusia dalam kerangka struktur pengetahuan atau *savior*.

2. Relasi kuasa sebagai "dominasi" (*domination*). Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi dimana ranah pilihan tindakan subyek yang didominasi begitu terbatas. Dominasi sendiri menunjuk pada relasi kuasa yang bersifat asimetris dimana didalamnya orang-orang yang tersubordinasi memiliki sedikit ruang untuk bermanuver karena ruang kebebasan mereka untuk bertindak sangat terbatas oleh karena efek dari kuasa. Hal ini tergambar dari bentuk praktek pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Flores Timur melalui program subsidi BBM untuk nelayan, program perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, program gemar makan ikan (Gemarin), dan program perikanan tangkap.
3. Relasi sebagai bentuk pemerintahan (*Government*). Konsepsi pemerintahan terutama berasosiasi dengan konsep tentang memimpin, dalam arti mengarahkan atau mengontrol tindakan. Konsep ini merujuk pada pelaksanaan kuasa atau pihak lain. Mulai dari pelaksanaan pemerintahan yang menjalankan dominasi secara nyata ataupun yang terwujud dalam timbale balik. Hal ini sesuai dengan tindakan pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan sumber daya perikanan di 3 desa yang mana adanya peran pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami dan menggambarkan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan sumber daya perikanan di tiga desa yaitu di Desa Adabang, Desa Ilepadung, dan Kelurahan Amagrapati. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi dan dinamika bukan sekedar pengukuran statistic atau perhitungan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga sumber utama: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti kepala bidang perikanan tangkap, ahli muda penyuluh perikanan, kepala bidang SDM, pengelola SPBN Amagrapati, kepala desa, dan nelayan di Kabupaten Flores Timur dan juga 3 desa sebagai objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur untuk memahami pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terkait kebijakan Dinas Perikanan yang berkaitan dengan relasi kuasa dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Selain wawancara, observasi juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. peneliti melakukan observasi langsung untuk mengamati interaksi kebijakan dan kegiatan masyarakat nelayan di 3 desa dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Observasi membantu mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang kebijakan Dinas Perikanan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di 3 desa. Data tambahan diperoleh melalui studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan daerah, kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya prikanan melalui program subsidi BBM untuk nelayan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, program gemar makan ikan (Gemarin), dan program perikanan tangkap. Dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, studi kasus perbandingan tiga desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan tentang membongkar Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan sumber daya perikanan studi kasus perbandingan 3 desa. ***Pertama*** Distribusi Subsidi BBM unntuk nelayan "Secara garis besar Kabupaten Flores Timur mempunyai potensi perikanan yang luar biasa sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di daratan Flores. Digambarkan bahwa adanya dukungan dari pemerintah terkait capaian program yang yang telah dilakukan lewat pembenahan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan di Kabupaten Flores Timur, memberikan bantuan penyuluhan sesuai dengan pedoman yang ada. Subsidi BBM untuk nelayan, merupakan sebuah langkah yang telah diambil oleh dinas perikanan Kabupaten Flores Timur adalah penimbunan BBM (Perda No. 2/2004). Yang telah menunjukan bahwa operasional pendistribusian BBM bersubsidi selama ini diawasi agar lebih tepat sasaran sesuai dengan skala usaha penangkapan. Untuk menjamin ketersediaannya pasokan BBM bersubsidi dengan harga yang terjangkau untuk nelayan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Membangun SPBUN (stasiun pengisian bahan bakar) mini khusus nelayan dengan armada < 5 GT, di PPI Amgrapati dan
2. Mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran; dengan tetap memantau penyaluran BBM bersubsidi dan juga memantau ketika nelayan hendak membeli BBM bersubsdi di PPI Amagrapati, dengan harga solar subsidi perliter Rp 6.800 dan harga normal Rp 9.275 perliter.

Berkaitan dengan distribusi subsidi BBM hanya di layani di SPBN Amagrapati dimana para nelayan diwajibkan membawa serta kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan sperti dokumen kapal, dokumen pribadi seperti KTP dan kelengkapan lainnya. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka nelayan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan subsidi BBM solar. Hal ini bahwa kurangnya distribusi BBM kepada nelayan di desa yang menyebabkan nelayan tidak mempunyai akses untuk mendapatkan kuota subsidi BBM. Selain itu nelayan di desa tidak mempunyai kelengakapan administrasi untuk mendapatkan subsidi BBM.

Tabel 1. Persyaratan Surat Rekomendasi Subsidi BBM JBT Solar untuk Sektor Perikanan

No	Persyaratan
1	Identitas konsumen pengguna (KTP, kartu yang diterbitkan oleh oleh Kementrian)
2	Surat keterangan tentang usaha yang diterbitkan oleh lurah/Desa/Camat/Perangkat Daerah (PD) yang membidangi
3	Surat keterangan/dokumen/spesifikasi peralatan yang digunakan
4	Informasi data/ volume konsumsi jenis BBM Tertentu (JBT) yang digunakan sebagai bahan bakar peralatannya, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal sampai dengan 10 GT (10 *gross tonase*)
5	Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir
6	Rencana lama operasi
7	Estimasi sisa minyak solar (*gas oil*) yang ada di kapal
8	Fotokopi surat izin penangkapan ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) atau Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)
9	Usulan kebutuhan BBM dari pemilik kapal, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal diatas 10 GT (sepuluh *gross tonase*)
10	Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)

Sumber: Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019

Berkaitan dengan distribusi subsidi BBM untuk nelayan di Kabupaten Flores Timur dapat dikatakan belum optimal karena masih banyak nelayan di desa yang belum menggunakan BBM subsidi untuk mendukung kegiatannya sebagai nelyan hal ini karena banyaknya nelayan yang belum memiliki surat izin maupun fasilitas kapal motor. ***Kedua,*** Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan kecil, yang sudah termuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak garam. Pada dasarnya Undang-Undang sudah menjawab adanya tanggung jawab negara terhadap nelayan. Sebagaimana sudah digariskan dalam konstitusi, bahwa tanggung jawab negara adalah melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan hal tersebut pun menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Wawancara bersama ahli muda penyuluh perikanan mengatakan bahwa, jumlah nelayan di Kabupaten Flores Timur 13.094 jiwa terdiri dari nelayan penuh 8.104 jiwa, nelayan sambilan utama 3.690 jiwa, nelayan sambilan tambahan 1.300 jiwa yang tersebar di seluruh kabupaten Flores Timur. Dan setiap desa di Kabupaten Flores Timur tentunya mempunyai kelompok nelayan yang kami kunjungi setiap 3 bulan sekali untuk memberikan penyuluhan ataupun pelatihan terkait pengelolaan perikanan, memberikan pelatihan di lapangan dalam hal ini penyuluh perikanan memberikan diskusi kecilpembinaan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Hal-hal yang menjadi catatan kami bahwa sebagian besar kelompok nelayan di desa belum berkembang secara maksimal artinya bahwa kelompok-kelompok nelayan di desa tidak aktif, walaupun ada beberapa kelompok nelayan yang sangat aktif dan antusias dalam kehidupan sebagai nelayan.

Sebagai penyuluh perikanan kami juga senantiasa menghimbau masyarakat di daerah pesisir untuk menjaga ekosistem laut dengan tidak menangkap ikan menggunakan bahan peledak dan sudah terbukti bahwa sebagian daerah di Kabupaten Flores Timur tidak lagi menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan. Sebagai penyuluh kami juga memberikan pelatihan dan pembinaan kepada istri-istri nelayan bukan hanya bapak-bapak saja yang menangkap ikan tapi mengolah hasil ikan untuk dipasarkan, jenis olahan pelatihan yaitu cara membuat naget dari ikan, bakso, dan abon ikan. Berjumlah 34 kelompok dari tahun 2017 dan sampai sekarang yang masih bertahan itu 8 kelompok alasannya adalah kurangnya modal, hasil pemasarannya sepi, dan sisanya tidak aktif.

Adapun jumlah nelayan di Kelurahan Amagrapati 171, jumlah nelayan di Desa Ilepadung 33, jumlah nelayan di Desa Adabang 20. Berdasarkan data tersebut bahwa jumlah nelayan lebih banyak berada di Kelurahan Amagrapati yang mana lebih memiliki banyak nelayan, namun yang menjadi kelemahannya bahwa kelompok nelayan di Kelurahan Amagrapati sudah tidak ada lagi yang ada hanya nelayan-nelayan yang memilih bekerja secara indifidu maupun di kapal nelayan milik pemerintah dansebagai buruh kapal di pelabuhan. Wawancara bersama kepala desa yaitu pentignya kolaborasi kerjasama dalam pengelolaan sumber daya perikanan melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil melalui sosialisasi, pendampingan dan memberikan bantuan peralatan tangkap kepada nelayan.

Ketiga, Program Gemarin (Gemar Makan Ikan) ini merupakan kolaborasi antara Dinas Perikanan dengan Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka stunting, dan juga melalui program ini dapat meningkatkan minat masyarakat Flores Timur untuk selalu mengkonsumsi ikan karena ikan kaya akan protein untuk kesehatan tubuh. Namun program Gemarin ini hanya terlaksana di Kelurahan Larantuka Kecamatan Larantuka, Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur, Desa Lamahala Jaya, Desa Terong Kecamatan Adonara Timur, Desa Tiwa Tobi Kecamatan Ile Mandiri, dan program ini belum menjangkau semua wilayah di Kabupaten Flores Timur. Dalam program Gemarin ini dilakukan berbagai macam kegiatan ke sekolah-sekolah TK, SD, SMP, dan ibu hamil untuk selalu gemar makan ikan dengan berbagai olahan dan juga mengenalkan kepada anak-anak tentang potensi ikan dan manfaatnya untuk kesehatan.

Keempat, Program Perikanan Tangkap Pengembangan dukungan infrastruktur yang digambarkan bahwa adanya dukungan bantuan fisik dari pemerintah terkait capaian program pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Flores Timur yang telah dilakukan yaitu menyediakan berbagai macam fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan nelayan di desa-desa yaitu dengan menghadirkan berbagai fasilitas penunjang seperti perahu motor, cool box. Dan peralatan tangkap lainnya untuk membantu masyarakat nelayan dalam mmengelola sumber daya perikanan tangkap. Yang menjadi kendalanya bahwa sebagian besar nelayan di Desa Ilepadung dan desa Adabang masih menggunakan peralatan tangkap yang cukup sederhana sehingga mempengaruhi pendapatan mereka sebagai nelayan. Selain itu sangat diperlukan juga peran dari pemerintah desa dalam mendukung keberadaan kelompok nelayan melalui pemberdayaan, pengorganisasian dan memberikan bantuan peralatan tangkap untuk nelayan agar bisa menciptakan kesejahteraan nelayan di daerah pesisir.

KESIMPULAN

Governmentality merupakan mekanisme berlangsungnya kekuasaan dalam relasi kekuasaan, dimana pemerintah hadir dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terutama dalam pengelolaan sumber daya alam perikanan Kabupaten Flores Timur. Hal ini digambarkan bahwa Kabupaten Flores Timur mempunyai Sumber daya perikanan yang baik namun pemerintah dalam mengembangkan dan pengelolaan sumber daya perikanan terutama para pemangku kepentingan yang dimulai dari Dinas Perikanan sampai dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam mewujudkan pengembangan sumber daya perikanan yang berkelanjutan melalui relasi dan kerjasama yang tentunya harus bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik.

Berbagai program kebijakan Subsidi BBM untuk nelayan, pemberdayaan masyarakat pesisir program, program perikanan tangkap, namun kondisi factual menunjukan bahwa upaya kebijakan yang diambil belum mampu memberdayakan masyarakat pesisir secara optimal, karena masih adanya keterbatasan sarana dan prasaran kegiatan perikan, sumber daya manusia (SDM) yang masih lemah, masih rendahnya perhatian dari pemerintah terhadap kegiatan perikanan. Kurangnya pelatihan dan proses pendampingan juga merupakan salah satu penyebab dalam melemahnya relasi transfer pengetahuan kepada masyarakat kelompok nelayan di 3 desa dan secara umum di Kabupaten Flores Timur.

Dinas Perikanan perlu untuk menerapkan dan mengaplikasikan setiap program kebijakan yang telah dibuat di setiap wilayah tanpa terkecuali dalm hal ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkaitan dengan program kebijakan. Subsidi BBM untuk nelayan yaitu dengan pendistribusian BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, bagi nelayan-nelayan kecil di desa yang belum mampu mendapatkan subsidi BBM karena belum memiliki syarat administrasi

yang jelas di 3 desa tersebut. Selain itu juga pemerintah perlu menambahkan kuota subsidi BBM bagi nelayan karena kebutuhan nelayan lebih dari kuota yang ada.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, program ini perlu untuk ditingkatkan lagi untuk bisa membantu masyarakat dalam menjawab persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, karena masih ditemukan kendala antara lain kurangnya pendampingan dan pemberdayaan bagi kelompok nelayan di 3 desa. Terkait hal ini juga bahwa masyarakat nelayan perlu difasilitasi terkait pengelolaan sumber daya perikanan karena masih ditemukan adanya nelayan yang menggunakan bahan peledak (bom) untuk menangkap ikan. Program gemarin (gemar makan ikan), merupakan kerjasama antara Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka stunting, sebaiknya program ini perlu dikaji kembali dan dilaksakan di semua wilayah desa di Kabupaten Flores Timur. Program program perikanan tangkap. Kurangnya sarana dan prasarana tangkap bagi nelayan di desa maka dari itu Dinas Perikanan perlu untuk melakukan pendataan terhadap nelayan-nelayan yang belum mendapatkan bantuan peralatan tangkap di desa Ilepadung, Adabang, Kelurahan Amagrapati. Harus ada sinergitas dan kerjasama antara Dinas Perikanan, Pemerintah desa, dan masyarakat nelayan sehingga setiap program yang ada dapat berkelanjutan dan membawa perubahan.

DAFTAR REFERENSI

Agus sulaiman Bolkiah (2021). Evaluasi Program Bidang Pemberdayaan Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia Institut Pemerintahan Dalam Negeri Volume 13 No.2.

Charles, A.T (2001). Sustainable Fishery Systems. Oxford: Blackwell Science. 370

Moleong, L. (2007). Metodologi Penelitian kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mudhofir, Abdil, Mughis. 2013. Governmentality Dan Pemberdayaan Dalam Advokasi Lingkungan Kasus Lumpur Lapindo. Jakarta; Jurnal LabSos UI.

Foucault, Michel, 1979, Discipline and Punish,' The Birth of the Prison. New York: Vintage.

Gregorius Sahdam. (2020) Membongkar Selubung Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality. Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Volume 1 No1.

Vinsensius. (2021). Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur Prpvinsi NTT. Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Institut Pemerintahan Dalam Negeri Volume 13 No.2.

Wirawan. 2012. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta sosial, Definisi Sosial Dan Perilaku Sosial. Jakarta: Kencana.

(https://lawforjustice.wordpress.com/tag/wilayah-perairanlaut-Indonesia/. Diakses pada tanggal 03 Juli 2022).